



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Alex Noerdin
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 14 - 3 - 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ALEX NOERDIN".

H. ALEX NOERDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis	1.1	Produksi padi	ton	4.270.088
			Produksi jagung	ton	182.984
			Produksi kedelai	ton	17.317
2.	Meningkatnya produksi, produktivitas komoditi unggulan perkebunan dan pendapatan petani	2.1	Produksi karet	ton	1.180.000
			Produksi kelapa sawit	ton	2.270.000
			Produksi kelapa	ton	61.500
			Produksi kopi	ton	142.000
3.	Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan	3.1	Produksi kayu dari hutan tanaman	juta m ³ /tahun	4,25
4.	Meningkatnya produksi daging	4.1	Produksi daging	ton	73.370
			Produksi susu	liter	105.128,00
			Produksi telur	ton	80.283
5.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	5.1	Produksi perikanan tangkap	ton	96.292,70
			5.2	Nilai Tukar Nelayan	%
6.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	6.1	Produksi perikanan budidaya	ton	519.670
7.	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan di Sumsel	7.1	Persentase pertumbuhan unit usaha industri pengolahan	%	2
8.	Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan	8.1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	34.320
			8.2	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	orang
9.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata	9.1	Jumlah penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata	orang	46.386
10.	Optimalnya pengelolaan sektor pertambangan batubara	10.1	Jumlah produksi hasil tambang batubara	juta ton	24,50
11.	Optimalnya penerimaan daerah sektor pertambangan dan energi	11.1	Nilai PNBP pertambangan (royalti dan landrent)	Rp. Miliar	176
			11.2	Nilai PNBP minyak bumi	Rp. Miliar
			11.3	Nilai PNBP gas bumi	Rp. Miliar
12.	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis daya lokal	12.1	Jumlah klaster industri unggulan daerah	unit usaha	5
13.	Meningkatnya investasi di Provinsi Sumatera Selatan	13.1	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. Triliun	9,18
			13.2	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. Triliun
14.	Meningkatnya daya saing ekspor non migas dan pengendalian impor	14.1	Nilai ekspor	US \$ juta/tahun	2.926,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
		14.2	Percentase fluktuasi perubahan nilai impor per tahun	%	<20
15.	Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi	15.1	Percentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik	%	87,0
		15.2	Percentase jalan dalam kondisi mantap	%	85
16.	Terwujudnya akses dan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan	16.1	Jumlah produksi listrik	GWh	7.298
		16.2	Rasio elektrifikasi	%	82,50
		16.3	Jumlah pasokan listrik (MW)	MW	1.345,02
		16.4	Percentase desa dengan akses listrik (%)	%	94,02
17.	Tertanganinya infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan secara optimal	17.1	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	kawasan	3
18.	Meningkatnya penanganan drainase permukiman yang tepat	18.1	Penanganan drainase permukiman	kabupaten/kota	3
19.	Meningkatnya penanganan TPA sampah yang efektif dan efisien	19.1	Penanganan Sarana dan Prasarana TPA sampah	kabupaten/kota	2
20.	Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)	20.1	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar	HKI	3
21.	Berkembangnya bisnis inovatif	21.1	Jumlah pusat inovasi	PI	4
22.	Berkembangnya lmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi (IPTEKIN) strategis daerah	22.1	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan lmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi (IPTEKIN)	kabupaten/kota	3
		22.2	Jumlah kelompok wirausaha/tenant yang telah lulus diinkubasi (telah memasarkan produknya)	tenant	2
		22.3	Jumlah teknologi/inovasi hasil litbang yang dimanfaatkan	teknologi/inovasi	12
		22.4	Jumlah kemitraan strategis lmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi (IPTEKIN)	dokumen perjanjian nasional	3
23.	Memantapkan ketersediaan pangan dengan Pola Pangan Harapan	23.1	Skor Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan	skor	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
24.	Meningkatnya penanganan rawan pangan	24.1	Penurunan rawan pangan	% per tahun	1
25.	Terlaksananya sistem didistribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis	25.1	Jenis pangan pokok strategis yang didistribusikan ke masyarakat antar waktu antar wilayah	komoditi	11
		25.2	Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen	Rp/Kg	≥ Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
26.	Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	26.1	Pola pangan harapan tingkat konsumsi	skor	91,46
		26.2	Kandungan cemaran biologis, kimia dan fisik pangan segar buah (anggur) dan sayur (cabe merah besar)	uji Lab	di bawah ambang batas
27.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan	27.1	Nilai survei kepuasan masyarakat	nilai	65,51
28.	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	28.1	Opini laporan keuangan daerah	opini	WTP
29.	Meningkatnya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	29.1	Persentase SKPD dengan nilai akuntabilitas katagori B	%	75,00
		29.2	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	poin	3,3
30.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang tepat waktu	30.1	Persentase penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS secara tepat waktu di provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan	%	100
31.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan	31.1	Persentase risalah rapat yang tepat waktu	%	100
		31.2	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi sekretariat DPRD	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
		31.3	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	%	75
32.	Berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.1	Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kasus	225
		32.2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	92
33.	Menurunkan jumlah kematian neonatal bayi dan balita	33.1	Jumlah kematian bayi	kasus	110
		33.2	Jumlah kematian balita	kasus	48
		33.3	Angka harapan hidup	tahun	70,90
34.	Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan	34.1	Persentase balita gizi buruk	%	< 1
		34.2	Persentase balita gizi kurang	%	13
		34.3	Persentase stunting pada anak balita	%	32
35.	Menurunkan jumlah kematian ibu maternal	35.1	Jumlah kematian ibu maternal	kasus	138
36.	Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang.	36.1	Angka kelulusan SD	%	99,75
		36.2	Angka kelulusan SMP	%	99,90
		36.3	Angka kelulusan SMA/K	%	99,90
37.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian pemuda	37.1	Jumlah pemuda Sumatera Selatan yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	orang/orang	5/32
		37.2	Jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda	unit	50
		37.3	Jumlah penurunan pemuda pengguna narkoba	%	1
38.	Meningkatnya prestasi olahraga	38.1	Jumlah perolehan medali emas atlet Sumatera Selatan	medali	17
39.	Meningkatnya industri olahraga	39.1	Angka pertumbuhan usaha baru di bidang jasa dan industri olahraga	produsen	2
40.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	40.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	70,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
		40.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	68,32
41.	Meningkatnya perlindungan perempuan	41.1	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani	kasus	211
		41.2	Jumlah kasus perdagangan perempuan yang ditangani	kasus	11
42.	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	42.1	Jumlah kasus pelanggaran hak-hak anak yang ditangani	kasus	211
		42.2	Jumlah instansi/perusahaan yang memiliki ruang laktasi	instansi / perusahaan	8
43.	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja	43.1	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	orang	250
		43.2	Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan	orang	3.000
		43.3	Persentase peserta pelatihan yang telah terserap dipasar kerja	%	60
44.	Menurunnya angka pengangguran	44.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,42
		44.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,50
		44.3	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	24.138
		44.4	Jumlah TKI yang dikirim keluar negeri secara legal	orang	1.800
45.	Meningkatnya pencapaian sasaran indikator makro sesuai target RPJMD	45.1	Persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan	%	6,25
		45.2	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan	poin	67,94
		45.3	Persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan	%	12,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2016
46.	Meningkatnya kesejahteraan hidup Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)	46.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat hidup layak	%	6,58
47.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	47.1	Angka pertumbuhan modal koperasi	%	2
		47.2	Persentase kenaikan volume usaha koperasi	%	2
		47.3	Persentase kenaikan omset UMKM	%	1
48.	Meningkatnya ekonomi kemasyarakatan	48.1	Angka pertumbuhan UMKM	%	1
		48.2	Angka pertumbuhan wirausaha baru	UMKM	700
		48.3	Jumlah koperasi aktif	unit	4.485
49.	Meningkatkan penerimaan sub sektor kehutanan	49.1	Jumlah penerimaan sub sektor kehutanan	Rp. Miliar/Tahun	20
50.	Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan pengelolaan DAS terpadu	50.1	Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan	Ha/tahun	70
		50.2	Jumlah DAS/sub DAS yang dikelola secara terpadu	unit	1
51.	Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	51.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	58,99
52.	Menurunnya laju emisi GRK	52.1	Jumlah penurunan emisi GRK di 6 sektor (Pertanian, Kehutanan & Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah)	ton CO2eq	2.600.380.141,50
		52.2	Jumlah penurunan laju emisi (GRK) di sektor limbah	ton CO2 eq/ %	160.528 /13,01
53.	Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana	53.1	Respon time kejadian bencana	jam	3
54.	Berkurangnya kerugian akibat bencana	54.1	Persentase kerugian akibat bencana	%	80
55.	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	55.1	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	20

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 393.400.000	APBD
2	Pendidikan Dasar	Rp 6.433.000.000	APBD
3	Pendidikan Menengah	Rp 19.856.087.000	APBD
4	Pendidikan Non Formal	Rp 6.068.616.100	APBD
5	Pendidikan Luar Biasa	Rp 372.000.000	APBD
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.152.340.000	APBD
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 4.383.380.000	APBD
8	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Rp 6.802.989.500	APBD
9	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 3.811.844.816	APBD
10	Penzawasan Obat dan Makanan	Rp 73.300.000	APBD
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 845.751.000	APBD
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 2.492.276.600	APBD
13	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 385.185.000	APBD
14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 2.924.285.500	APBD
15	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 275.160.000	APBD
16	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp 139.487.838.084	APBD
18	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp 1.181.360.000	APBD
19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp 158.639.500	APBD
20	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp 974.200.000	APBD
21	Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak	Rp 444.573.000	APBD
22	Pendidikan Kesehatan	Rp 1.190.300.000	APBD
23	Penanganan Keluarga Berencana	Rp 519.474.000	APBD
26	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rp 3.354.227.100	APBD
27	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD (RS. Ermaldi Bahar)	Rp 19.000.000.000	APBD
28	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 611.525.542.000	APBD
29	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 42.298.650.000	APBD
30	Inspeksi Jalan dan Jembatan	Rp 29.812.745.000	APBD
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 5.373.475.000	APBD
32	Pembangunan Talud/Turap dan Brojong	Rp 27.500.000.000	APBD
33	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 81.550.195.000	APBD
34	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp 9.342.410.000	APBD
35	Pengendalian Banjir	Rp 100.455.706.000	APBD
36	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 3.000.000.000	APBD
37	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 16.975.000.000	APBD
38	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 167.338.000.000	APBD
39	Perencanaan Tata Ruang	Rp 2.250.000.000	APBD
40	Penataan Kawasan	Rp 3.500.000.000	APBD
41	Penataan Bangunan	Rp 33.350.000.000	APBD
42	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 1.425.000.000	APBD
43	Perencanaan Tata Ruang	Rp 748.554.000	APBD
44	Pemanfaatan Tata Ruang	Rp 60.000.000	APBD
45	Pengembangan Data/Informasi	Rp 235.572.000	APBD
46	Kerjasama Pembangunan	Rp 137.400.000	APBD
47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 181.499.445	APBD
48	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.173.216.975	APBD
49	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 720.138.000	APBD
50	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 613.571.000	APBD
51	Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 545.013.080	APBD
52	Pengembangan LLAJ	Rp 1.909.140.000	APBD
53	Pengembangan LLASDP	Rp 525.000.000	APBD
54	Pengembangan Transportasi Udara	Rp 396.450.000	APBD
55	Penanggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)	Rp 1.770.000.000	APBD
56	Pengembangan Transportasi Perkotaan	Rp 900.000.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
57	Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan	Rp 4.840.114.000	APBD
58	Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan	Rp 1.275.000.000	APBD
59	Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Rp 676.559.000	APBD
60	Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan,	Rp 260.000.000	APBD
61	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 739.699.000	APBD
62	Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 188.360.000	APBD
63	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 951.432.000	APBD
64	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 180.450.000	APBD
65	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 324.000.000	APBD
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 51.500.000	APBD
67	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp 267.805.000	APBD
68	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp 3.258.246.500	APBD
69	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 5.102.938.500	APBD
70	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.923.820.000	APBD
71	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 1.320.800.000	APBD
72	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp 95.508.000	APBD
73	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Rp 155.000.000	APBD
74	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 3.250.000	APBD
75	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 30.000.000	APBD
76	Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	Rp 29.800.000	APBD
77	Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Rp 10.303.216.000	APBD
78	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 661.500.000	APBD
79	Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 540.000.000	APBD
80	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 575.000.000	APBD
81	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 70.000.000	APBD
82	Pengembangan Sistem Pedukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 176.000.000	APBD
83	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 325.440.000	APBD
84	Perkuatan Permodalan UMKMK	Rp 118.900.000	APBD
85	Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK	Rp 94.500.000	APBD
86	Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK	Rp 49.000.000	APBD
87	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 753.226.000	APBD
88	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 630.715.600	APBD
89	Pengembangan Nilai Budaya	Rp 490.000.000	APBD
90	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 2.050.000.000	APBD
91	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 2.160.000.000	APBD
92	Permuseuman dan Nilai-Nilai Budaya	Rp 475.000.000	APBD
93	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 3.044.000.000	APBD
94	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp 310.900.000	APBD
95	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan IPTEK Kepemudaan Serta Penanggulangan HIV-AIDS	Rp 237.325.000	APBD
96	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Rp 164.847.000	APBD
97	Pembinaan dan Permasarakatan Olah Raga	Rp 5.125.816.000	APBD
98	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 210.054.000	APBD
99	Kependuan / Kepramukaan	Rp 597.800.000	APBD
100	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 567.800.000	APBD

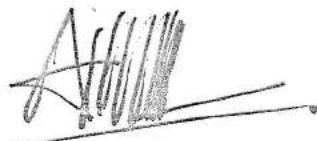
No	Program	Anggaran	Keterangan
101	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 427.925.000	APBD
102	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 365.000.000	APBD
103	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp 386.500.000	APBD
104	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 409.770.000	APBD
105	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	Rp 360.894.000	APBD
106	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat	Rp 72.200.000	APBD
107	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 11.521.601.000	APBD
108	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp 14.200.387.900	APBD
109	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Rp 615.000.000	APBD
110	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 282.532.000	APBD
111	Mengintensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 182.967.205.170	APBD
112	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.799.000.000	APBD
113	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 2.708.512.500	APBD
114	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota	Rp 1.069.470.000	APBD
115	Perumusan Kebijakan Dibidang Keagamaan	Rp 3.032.900.000	APBD
116	Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp 93.300.000	APBD
117	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Rp 2.176.608.100	APBD
118	Pembangunan Bidang Ekonomi	Rp 1.198.954.050	APBD
119	Kedinasan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 238.778.400	APBD
120	Kerjasama Wilayah Perbatasan	Rp 589.109.750	APBD
121	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 30.756.025.000	APBD
122	Perumusan Kebijakan diBidang HIV/AIDS dan UKS	Rp 62.230.000	APBD
123	Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp 53.250.000	APBD
124	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 11.521.601.000	APBD
125	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 639.375.000	APBD
126	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.080.000.000	APBD
127	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 107.500.000	APBD
128	Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Rp 2.768.562.000	APBD
129	Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	Rp 307.248.000	APBD
130	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp 36.200.000	APBD
131	Penguatan Kelembagaan Litbang	Rp 70.000.000	APBD
132	Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan	Rp 50.000.000	APBD
133	Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan	Rp 50.000.000	APBD
134	Litbang dan Inovasi Bidang Sosial dan Kemasvarakatan	Rp 280.000.000	APBD
135	Inkubator Teknologi	Rp 723.650.000	APBD
136	Pendayagunaan Iptek	Rp 246.000.000	APBD
137	Desiminasi IPTEK Hasil Litbang dan Inovasi	Rp 360.000.000	APBD
138	Kemitraan Inovasi IPTEK	Rp 369.500.000	APBD
139	Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Rp 50.000.000	APBD
140	Program Litbang,dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rp 75.000.000	APBD
141	Program UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumsel	Rp 433.000.000	APBD
142	Program Science Techno Park (STP) / Agro Techno Park (ATP)	Rp 452.000.000	APBD
143	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Rp 74.100.000	APBD
144	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota	Rp 249.300.000	APBD
145	Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani	Rp 16.000.000	APBD
146	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota	Rp 459.842.000	APBD
147	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 730.400.000	APBD
148	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota	Rp 7.249.840.400	APBD
149	Program Pendidikan Kedinasan	Rp 710.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
150	Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Rp	93.720.000	APBD
151	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan daerah Rawan Pangan	Rp	712.800.000	APBD
152	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	Rp	309.000.000	APBD
153	Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan	Rp	317.500.000	APBD
154	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp	378.690.000	APBD
155	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan	Rp	5.876.136.000	APBD
156	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	Rp	830.323.000	APBD
157	Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Rp	70.000.000	APBD
158	Penyeleman dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	300.000.000	APBD
159	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp	100.000.000	APBD
160	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp	100.000.000	APBD
161	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp	5.396.670.000	APBD
162	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Rp	1.110.000.000	APBD
163	Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi	Rp	5.407.107.000	APBD
164	Penguatan Kelembagaan KPID	Rp	103.455.000	APBD
165	Pengawasan Isi Siaran	Rp	78.850.000	APBD
166	Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	Rp	98.840.000	APBD
167	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	10.229.200.000	APBD
168	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Rp	214.300.000	APBD
169	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Rp	613.688.500	APBD
170	Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp	2.328.293.900	APBD
171	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp	127.400.000	APBD
172	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rp	2.272.450.000	APBD
173	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian	Rp	2.142.700.000	APBD
174	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Rp	435.942.000	APBD
175	Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan	Rp	110.400.000	APBD
176	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp	194.660.000	APBD
177	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Rp	325.790.000	APBD
178	Pengembangan Perbenihan Perkebunan	Rp	237.800.000	APBD
179	Proteksi Tanaman Perkebunan	Rp	592.176.000	APBD
180	Pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan/PPHP	Rp	217.885.000	APBD
181	Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP	Rp	173.818.000	APBD
182	Pengembangan Sentra - Sentra Produksi	Rp	102.500.000	APBD
183	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	1.034.900.000	APBD
184	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	6.959.383.138	APBD
185	Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan	Rp	175.000.000	APBD
186	Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan	Rp	50.000.000	APBD
187	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	360.200.000	APBD
188	Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Rp	185.000.000	APBD
189	Pemberdayaan Kelembagaan dan ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Rp	1.725.572.000	APBD
190	Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Tepat Guna	Rp	200.000.000	APBD
191	Pengukuhan Kawasan Hutan	Rp	119.248.000	APBD
192	Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan	Rp	498.770.000	APBD
193	Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Rp	181.800.000	APBD
194	Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi	Rp	202.460.000	APBD
195	Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan	Rp	266.810.000	APBD
196	Penurunan Laju Deforestasi	Rp	2.809.295.000	APBD
197	Menurunkan Laju Degradasi Hutan	Rp	65.904.000	APBD
198	Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD + dan RAD GRK	Rp	131.633.998	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
199	Peningkatan Target Penanaman Hutan	Rp 95.350.000	APBD
200	Peningkatan Produksi Kayu HTI	Rp 42.220.000	APBD
201	Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan	Rp 194.540.500	APBD
202	Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu	Rp 136.740.000	APBD
205	Pengusahaan Pertambangan dan peningkatan Produksi Batubara	Rp 800.000.000	APBD
206	Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM	Rp 300.000.000	APBD
207	Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas	Rp 225.000.000	APBD
208	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Untuk	Rp 23.134.340.000	APBD
209	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 5.825.000.000	APBD
210	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 3.475.000.000	APBD
211	Pengembangan Kemitraan	Rp 505.000.000	APBD
212	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan	Rp 984.515.000	APBD
213	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 1.175.000.000	APBD
214	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 458.380.000	APBD
215	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 372.610.000	APBD
216	Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provinsi Sumatera Selatan	Rp 1.331.830.000	APBD
217	Optimalisasi LPPMHP	Rp 285.000.000	APBD
219	Pengembangan Teknologi Pertaian, Perikanan, dan Kehutanan Tepat Guna	Rp 200.000.000	APBD
220	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 244.664.000	APBD
221	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp 376.071.160	APBD
222	Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan	Rp 63.694.000	APBD
223	Penguatan Sitem Logistik Daerah	Rp 110.000.000	APBD
224	Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Rp 43.020.044.800	APBD
225	Pengembangan dan Pembinaan Ovop	Rp 1.200.000.000	APBD
226	Pengembangan Klaster Industri	Rp 50.000.000	APBD
227	Pengembangan Industri Kreatif	Rp 150.000.000	APBD
229	Pengembangan Transmigrasi Sumatera Selatan	Rp 80.000.000	APBD
230	Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp 426.720.000	APBN
231	Bina Administrasi Kewilayahans	Rp 1.831.232.000	APBN
232	Bina Pemerintahan Desa	Rp 17.997.320.000	APBN
233	Bina Pembangunan Daerah	Rp 647.000.000	APBN
234	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 2.841.169.000	APBN
235	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp 519.425.487.000	APBN
236	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Rp 19.553.762.000	APBN
237	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Rp 21.293.699.000	APBN
238	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Rp 16.167.072.000	APBN
239	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 690.268.715.000	APBN
240	Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 27.162.344.000	APBN
241	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 14.493.311.000	APBN
242	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Rp 750.000.000	APBN
243	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 3.730.000.000	APBN
244	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Kerjasama Luar Negeri	Rp 720.754.000	APBN
245	Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp 14.910.691.000	APBN
246	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Rp 2.108.158.000	APBN
247	Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 970.572.000	APBN
248	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Rp 3.410.700.000	APBN
250	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Rp 52.224.376.000	APBN

No	Program	Anggaran	Keterangan
251	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Rp 7.589.823.000	APBN
252	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 11.094.017.000	APBN
253	Kesfarmasian dan Alat Kesehatan	Rp 1.891.488.000	APBN
254	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Rp 6.081.552.000	APBN
255	Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Rp 2.867.355.000	APBN
256	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp 3.258.420.000	APBN
257	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 2.246.250.000	APBN
258	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp 1.772.364.000	APBN
259	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Rp 437.713.000	APBN
260	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Rp 10.045.479.000	APBN
261	Rehabilitasi Sosial	Rp 6.462.790.000	APBN
262	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 6.115.340.000	APBN
263	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Rp 6.074.294.000	APBN
264	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Rp 2.000.000.000	APBN
265	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.514.979.000	APBN
266	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Rp 3.214.500.000	APBN
267	Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 720.800.000	APBN
268	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp 2.050.676.000	APBN
269	Pengelolaan Ruang Laut	Rp 1.070.000.000	APBN
270	Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Rp 3.206.570.000	APBN
271	Penyelenggaraan Jalan	Rp 22.905.943.000	APBN
272	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	Rp 28.030.762.000	APBN
273	Pengembangan Kepariwisataan	Rp 4.048.008.000	APBN
274	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Rp 2.805.939.000	APBN
275	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp 280.616.000	APBN
276	Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 920.491.000	APBN
277	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Rp 2.130.855.000	APBN
278	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Rp 1.080.893.000	APBN
279	Pengembangan Perpustakaan	Rp 414.440.000	APBN
280	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp 660.878.000	APBN
281	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 53.135.420.000	APBN
282	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Rp 3.463.191.000	APBN
283	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 24.758.078.000	APBN
284	Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Rp 317.152.000	APBN
285	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp 1.474.767.000	APBN
286	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp 976.000.000	APBN
287	Kepemudaan dan Kolahragaan	Rp 10.949.541.000	APBN
288	Perencanaan & Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP)	Rp 3.885.118.000	APBN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN